

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk atau *plural society*. Hal tersebut terbentuk dari adanya perbedaan etnis, geografis, sosial, politik dan budaya bangsa Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia sudah sejak awal disadari, sehingga kemudian direfleksikan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki sistem sosial-budaya yang bersifat multietnis dan multikultural. Beragamnya etnis dan budaya bangsa Indonesia merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhitungkan aspek keberagamannya etnis dan budaya tersebut. Perbedaan antar etnis seyogyanya didudukkan sebagai kekayaan sosial-budaya yang menopang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Suku bangsa di Indonesia dapat diintegrasikan dengan menerapkan nilai nasionalisme dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila diyakini mampu menjadi pengikat keberagaman serta menjadi kesatuan dan persatuan Indonesia sebagaimana telah terbukti selama 69 tahun bangsa Indonesia merdeka.

Aspek sosial-kultural yang beranekaragam tersebut perlu diupayakan agar dapat menjadi budaya nasional yang berideologikan Pancasila, salah satu misinya adalah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Substansi dan nilai yang terkandung dalam Pancasila itulah yang dalam tesis ini disebut sebagai budaya kewarganegaraan (*civic culture*), bukan budaya komunitarian yang berintikan etnisitas. Keadaan ini sejalan dengan pemikiran Beiner dalam Alrakhman (2008, hlm. 2) tentang pluralisme, yang menyatakan ada 3 (tiga) inti teoritis yang dapat dibedakan sebagai dasar kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

(1) the first of these options I call "nationalism". The thrust of Scruton's argument is that what ultimately sustains the liberal state is not a sense of political membership in the state but the social loyalties and allegiances that define nationhood, and therefore that citizenship as a political concept is ultimately parasitic upon nationhood as a social concept. (2) the state is obliged to serve the pluralistic identities of subgroups, not vice

verse (3) there is a requirement that all citizens conform to a large culture, but this culture is national-civic, not national-ethnic.

Kutipan tersebut mengandung pengertian bahwa dalam masyarakat plural terdapat tiga hal yang harus diperhitungkan sebagai permasalahan nasional. Pertama, nasionalisme harus mendapat dukungan dari negara yang bebas yaitu bukan semata-mata keanggotaan politis dalam negara, akan tetapi sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan kesetiaan warga negara untuk membentuk kehidupan kebangsaan, warganegara dalam konsep politis cenderung dapat menjadi parasit dalam kehidupan kebangsaan. Kedua, bahwa Negara harus melayani identitas pluralisme sebagai subkelompok, bukan sebagai kebijakan. Artinya negara tidak dapat memaksakan sebuah kebijakan pada masyarakat plural untuk mengikuti semua peraturan tanpa memperhitungkan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Ketiga, ada hal yang diperlukan apabila semua warga negara menjadi masyarakat budaya yang semakin luas, maka budaya yang seharusnya terbentuk adalah budaya kewargaan trasional dan bukan kewargaan etnik.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dapat dimengerti agar terbentuk wujud toleransi bahwa manusia harus menjalankan proses belajar dalam kehidupannya sehari-hari yang menjadikan proses belajar tersebut menjadi suatu pengalaman belajar bagi pembentukan pengembangan kualitas diri dalam kehidupan nyata. Seperti halnya pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah, pendidikan formal yang memiliki partisipasi aktif antar individu yang berada pada lingkungan yang saling menguntungkan dalam hal mendidik, dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang baik dan kondusif.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki karakteristik tersendiri dimana lembaga ini berfungsi sebagai wahana pengembangan potensi anak menjadi dewasa, anak sebagai warganegara. Dimana fungsi sekolah yang utama adalah pendidikan intelektual, yakni “mengisi otak” anak dengan berbagai macam pengetahuan (Nasution 2004, hlm. 14).

Dan di sisi lain sekolah juga dapat dipandang sebagai suatu masyarakat yang utuh dan bulat yang memiliki kepribadian sendiri, dimana menjadi tempat untuk menanamkan berbagai macam nilai, pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Dengan kata lain, sekolah sebagai masyarakat belajar, berperan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti menumbuhkan, memotivasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang mencakup etika, logika, estetika dan praktika, sehingga tercipta manusia Indonesia yang utuh dan berakar pada budaya bangsa.

Oleh sebab itu, sebagai masyarakat belajar, sekolah tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan satu kesatuan yang memiliki tata kehidupan budaya. Sekolah tidak hidup menyendiri, melepaskan diri dari tatanan sosial budaya dalam masyarakat, melainkan merupakan satu sistem atau subsistem dan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka tata kehidupan yang berkembang dalam masyarakat ikut mewarnai gerak langkah sekolah, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang kehidupan yang lain. Sejarah menunjukkan bahwa sekolah lahir dari kebutuhan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, maka keberadaan sekolah berperan sebagai sarana dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh para pendahulu, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, sekolah merupakan salah satu kebutuhan nasional yang tak terpisahkan dan perjuangan, sesuai dengan tuntutan zamannya.

Budaya kewarganegaraan atau *civic culture* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembudayaan, proses pembinaan watak dan karakteristik. Berkaitan dengan hal itu budaya kewarganegaraan atau *civic culture* merupakan bagian suatu proses dan budaya politik. Winataputra (2007) menilai budaya kewarganegaraan sebagai sikap dan perilaku edukatif individu dalam konteks komunitas nasional yang berkewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang baik dan cerdas untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa.

Inti dari *civic culture* diantaranya pembinaan sikap nasionalisme yang dimana sikap nasionalisme merupakan suatu nilai yang sangat penting oleh setiap warga negara. Hal ini karena sikap setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam negara. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini

menunjukkan adanya kesinambungan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi antara warga negara, baik mengenai hak maupun kewajibannya.

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang ideal dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa dapat kita serap serta memaknainya dan konsepsi komitmen siswa dapat mewujudkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, makna baru di sekolah dapat mengembangkan nilai-nilai itu pada siswa dengan memaknai Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara untuk mewujudkan karakteristik warga negara melalui pembelajaran. Yang lebih dipopulerkan oleh Cogan (1998) sebagai warga negara yang cerdas dan baik atau *smart and good citizenship*.

Nasionalisme pada dasarnya menitikberatkan pada semangat, perasaan cinta kepada bangsa dan tanah air yang muncul karena adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia terdiri dari aneka ragam suku bangsa, ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi, maka nasionalisme itu sendiri ada ketika muncul keinginan untuk menyatukan keanekaragaman tersebut. Semangat nasionalisme diwujudkan oleh para pemuda tahun 1928 dalam sumpah pemuda yang menyatukan satu tekad bahwa mereka mencintai tanah air yaitu Indonesia, sumpah tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, para pemuda dengan suka rela mengorbankan semua yang dimilikinya untuk bertempur melawan penjajah hingga terlontar satu motto yang menggelora dalam hati, yaitu “Merdeka atau Mati”. Motto dapat memberikan semangat untuk berjuang membela Indonesia.

Namun pada era globalisasi seperti sekarang ini pemuda generasi bangsa malah semakin sedikit memiliki jiwa nasionalisme, ini dibuktikan dengan kurangnya rasa kesatuan dan persatuan yang diperlihatkan oleh anak muda jaman sekarang terutama para siswa-siswa SMA. Di televisi banyak kita melihat terjadi tawuran antar pelajar dimana pemicunya hanyalah kesalah pahaman kecil. Kesalah pahaman kecil antar pelajar ini dapat memicu gesekan-gesekan yang mengarah pada perbedaan agama, suku, ras bahkan antar golongan yang ujung-ujungnya berimbas pada permasalahan besar yang dapat menggerogoti keutuhan

NKRI. Kurangnya pemahaman akan rasa persatuan dan kesatuan antara para pelajar-pelajar tersebut merupakan sumber dari adanya tawuran antar pelajar. Dimana pemahaman terhadap perbedaan yang dimiliki janganlah dijadikan sebagai jurang pemisah. Namun perbedaan-perbedaan itulah yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk tetap mempertahankan kesatuan dan keutuhan Negara Indonesia.

Perlu diketahui sikap nasionalisme timbul pada waktu tertentu saja seperti ketika Piala AFF Usia 19 tahun 2013 maupun kejuaraan-kejuaraan lain yang telah berlalu dan diikuti oleh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di layar-layar televisi nasional. Ketika itu nasionalisme anak Indonesia menggebu-gebu dengan mendukung tim nasional melalui berbagai cara, contohnya menggunakan berbagai atribut seperti seragam timnas, mengibarkan bendera Merah Putih dan bahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Tapi setelah selesai kejuaraan, selesai pulalah kebersamaan yang menunjukkan sikap nasionalisme anak Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena tersendiri dikalangan pemuda Indonesia. Ketika terjadi sebuah peristiwa yang meuntut adanya persatuan, hanya ketika saat itulah para pemuda Indonesia yang notabena memiliki latar belakan yang berbeda dapat menyatukan perbedaannya. Namun ketika peristiwa penting tersebut telah terlewati, maka perbedaan tersebut akan kembali muncul dan menjadi ego tersendiri bagi pemuda-pemuda Indonesia.

Namun tidak semua peristiwa penting di Indonesia bisa menjadi pemicu adanya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda. Contohnya adalah peringatan hari-hari besar kenegaraan yang seharusnya dapat menjadi bukti adanya rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Dari pengamatan penulis terhadap siswa SMA di Kota Denpasar peringatan hari-hari besar kenegaraan seperti hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober maupun hari Pahlawan, 10 November seharusnya dapat menjadi pemupuk rasa nasionalisme dikalangan para pemuda terutama para pelajar di Indonesia. Namun pada kenyataannya hari-hari tersebut cenderung diabaikan begitu saja. Bahkan hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober kadang-kadang tidak diingat oleh para pelajar, padahal pada hari itu merupakan hari bersejarah dimana merupakan tonggak awal pemersatu Negara Indonesia dalam

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangankan Sumpah Pemuda yang memang tidak terlalu mencolok, hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang notabena merupakan hari libur nasional kadang-kadang hanya dianggap sebagai hari libur biasa yang dicantumkan sebagai tanggal merah di kalender.

Prilaku meremehkan hari-hari besar kenegaraan di kalangan pelajar khususnya siswa SMA seperti itu sangat sering penulis jumpai, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemaknaan dan pemahaman oleh para pelajar tentang pentingnya memperingati hari-hari besar kenegaraan seperti hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda. Karena bagi mereka memperingati hari-hari besar seperti itu kurang menarik dibandingkan dengan hal-hal yang telah mereka lakukan sehari-hari seperti bermain game online, chatting, dan lain sebagainya. Apalagi bagi mereka peringatan hari-hari kebesaran tersebut terlalu membosankan dan hanya itu-itu saja (seperti memperingatinya dengan upacara bendera, yang bahkan hampir mereka lakukan setiap hari senin).

Fenomena tersebut membuktikan bahwa rasa nasionalisme pemuda pada umumnya dan pelajar pada khususnya telah mulai menghilang dan mengalami degradasi dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika rasa nasionalisme tersebut tidak ditanamkan dari usia muda, kapan lagi penanaman rasa nasionalisme tersebut bisa kita lakukan.

Agar sikap nasionalisme tidak menghilang dan tetap tertanam di jiwa peserta didik, maka perlu diadakan suatu kegiatan untuk membentuk rasa nasionalisme khususnya kota Denpasar yang merupakan tujuan para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari berbagai belahan dunia atau mancanegara. Salah satunya adalah melalui kegiatan Pramuka. Gerakan pramuka sebagai organisasi kepemudaan yang mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan pendidikan di luar sekolah untuk menyiapkan generasi muda sebagai tunas bangsa, pandu pertiwi penerima tongkat estafet perjuangan para pendahulunya dalam melanjutkan perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai organisasi kepemudaan yang mengembangkan pendidikan kepramukaan mempunyai kaitan erat sekali dengan pendidikan formal. Bahkan

pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di setiap Sekolah Dasar dan Menengah bahkan di sebagian Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, salah satu unit kegiatan mahasiswanya adalah kegiatan pramuka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan urgensinya sangat tinggi dengan kebutuhan hidup manusia, bahkan pendidikan kepramukaan merupakan wujud dari usaha bela Negara.

Tujuan pendidikan kepramukaan adalah untuk mendidik para peserta didik atau siswa agar memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang kuat, memiliki aktivitas yang tinggi dalam kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan cinta tanah air.

Tingkat SMA merupakan jenjang tingkat Pramuka Penegak dimana pada masa ini rasa nasionalisme pemuda sangatlah labil sehingga siswa-siswa SMA sangat perlu diberikan pendidikan kepramukaan guna menanamkan dan meningkatkan rasa nasionalismenya. Namun pada kenyataannya kegiatan kepramukaan kurang mendapat tempat di mata masyarakat. Ini dapat dilihat dari pendapat para orang tua siswa yang menyatakan bahwa kegiatan kepramukaan hanyalah kegiatan senang-senang yang hanya bisa tepuk-tepuk dan nyanyi-nyanyi. Apabila ditinjau dari berbagai sisi dan pengamatan penulis selama menjadi pembantu pembina pramuka di beberapa sekolah, banyak kegiatan kepramukaan mengandung manfaat bagi anak didik.

Berkaitan dengan masalah di atas penulis bermaksud meneliti bagaimana budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dan pendidikan kepramukaan pada khususnya dapat mempengaruhi sikap nasionalisme siswa di tingkat SMA, dengan judul: “Pengaruh Budaya kewarganegaraan (*Civic Culture*) dan Pendidikan Kepramukaan Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa di SMA Negeri se-Kota Denpasar”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas menurunnya sikap nasionalisme di kalangan siswa SMA perlu segera diatasi. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan nasionalisme tersebut, salah satunya adalah melalui budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dan pendidikan kepramukaan.

Dan berdasarkan identifikasi tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh budaya kewarganegaraan (*civic culture*) terhadap sikap nasionalisme siswa SMA Negeri se-Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kepramukaan terhadap sikap nasionalisme siswa SMA Negeri se-Kota Denpasar?
3. Bagaimanakah pengaruh budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dan kegiatan pendidikan kepramukaan secara bersama-sama terhadap sikap nasionalisme siswa SMA Negeri se-Kota Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara objektif tentang bagaimana budaya kewarganegaraan (*civic culture*) melalui pendidikan kepramukaan terhadap sikap nasionalisme siswa SMA. Kemudian tujuan penelitian diperjelas menjadi tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui gambaran:

1. besarnya pengaruh budaya kewarganegaraan (*civic culture*) terhadap sikap nasionalisme siswa SMA se-Kota Denpasar.
2. besarnya pengaruh pendidikan kepramukaan terhadap sikap nasionalisme siswa SMA se-Kota Denpasar.
3. besarnya pengaruh budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dan pendidikan kepramukaan secara bersama-sama terhadap sikap nasionalisme siswa SMA se-Kota Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) melalui

pendidikan kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dikembangkan di sekolah dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi sekolah, diharapkan setiap sekolah dapat membentuk dan mengembangkan budaya kewarganegaraan di sekolahnya melalui pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan sikap nasionalisme.
- b. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk siswa dalam rangka pengembangan budaya kewarganegaraan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme.
- c. Bagi penulis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah inspirasi bagi peneliti PKn lainnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai budaya kewarganegaraan (*civic culture*) pada lingkungan atau komunitas lainnya.

E. Struktur Organisasi Tesis

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab memuat hal-hal, sebagai berikut.

Bab I “Pendahuluan”, bagian ini menyajikan uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta mencantumkan struktur organisasi tesis.

Bab II “Kajian Pustaka”, bagian ini memuat tentang kerangka konseptual, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kajian dalam penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka berpikir penelitian dan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang dikaji, asumsi penelitian, kerangka pikir penelitian, hipotesis penelitian, serta paradigma yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III “Metode Penelitian”. Bagian ini memuat pendekatan metode dan teknik penelitian, lokasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisis data (memuat tentang jenis analisis statistik beserta jenis *software* khusus yang digunakan), uji hipotesis, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument

penelitian serta proses pengembangan instrument (memuat uji validitas dan uji reliabilitas).

Bab IV “Temuan dan Pembahasan”, dalam bab ini menyampaikan dua hal utama, yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Bab V “Simpulan dan Rekomendasi”, merupakan organisasi terakhir penelitian yang berisi atau memuat dua hal pokok, yaitu: simpulan dan rekomendasi yang diajukan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.